

BAB II

TINJUAUN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep dan Teori

2.1.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2010:46), partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Menurut Abdulsyani (2006) perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab) yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut W.J.S Poerwadarminta (dalam Abdulsyani, 2006) mengartikan bahwa masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam Juanda,2017) masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam

lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, dan keinginan, masyarakat memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial inilah yang dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan konsep partisipasi ini, Mikkelsen (dalam Rukminto Adi, 2008) melihat bahwa konsep partisipasi ini telah menjadi bagian dari debat yang berkepanjangan antara lain terkait landasan teoritis dan dengan kemungkinan untuk diterapkannya (*practical applicability*) yang terkait dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

Istilah partisipasi dan partisipatoris menurut Mikkelsen (dalam Rukminto Adi, 2008) biasanya digunakan dimasyarakat dalam berbagai makna umum, sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*Participation is the voluntary contribution by people in project, but without their taking part in decisions-making*).
2. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan (*Participations is the sensitization of people to increase their receptivity and ability to respons to development projects*).

3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang memiliki makna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu (*Participations is an active process, meaning that the person or group in question take initiative and assets the autonomi to do so*).
4. Partisipasi adalah sebuah proses yang menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplentasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat (*Participations is the fostering of a dialogue between the local people and the project or the programme preparation, implementation, monitoring, and evaluation staff in order to btain information on the local contest and on social impacts*).
5. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*Participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*).
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri (*Participation is involvement in people's development of themselves, their lives, their environments*).

Menurut Mikkelsen (dalam Rukminto Adi, 2008) beberapa pengertian partisipasi diatas merupakan kata-kata yang sering digunakan dan belum memiliki arti sebagai partisipasi yang sesungguhnya. Arti partisipasi yang sesungguhnya

adalah yang berasal dari masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri (Mikkelsen, 2008).

Oleh karena itu Mikkelsen mengutip dari Chambers (dalam Rukminto Adi, 2008) istilah partisipasi sering kali digunakan dalam tiga bentuk, antara lain:

1. Partisipasi digunakan sebagai label kosmetik (*cosmetic label*). Kata partisipasi sebagai label kosmetik sering digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai proyek tersebut.
2. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengooptasi (*coopting practice*). Dalam hal ini, partisipasi digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga ditingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek. Contohnya komunitas yang memberikan bantuan seperti waktu, dana, tenaga dan materil untuk mensukseskan suatu proyek yang dibantu oleh pihak luar.
3. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan sebuah proses pembiayaan (*empowering process*). Dalam hal ini partisipasi memiliki arti sebagai suatu proses yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mereka mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah serta mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Dalam hal ini, Chambers menggambarkan bahwa “kita” (pelaku perubahan) berpartisipasi dalam proyek “mereka” (masyarakat

lokal) sehingga terjadi yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, partisipasi masyarakat menurut Rukminto Adi (2008) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan untuk mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dengan masyarakat yang ikut serta dalam berbagai tahap perubahan akan menjadikan masyarakat yang lebih berdaya dan akan memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Akan tetapi sebaliknya jika masyarakat tidak banyak terlibat dalam berbagai tahap perubahan atau hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang telah direncanakan oleh pelaku perubahan (contohnya pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat akan lebih cenderung menjadi dependent (bergantung) pada pelaku perubahan. Apabila hal ini sering terjadi, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Sebagai warga negara masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam berpartisipasi untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian kelompok. Sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Ide-ide tersebut dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan baik yang bersifat formal ataupun informal. Dalam rapat atau pertemuan kelompok itu pemerintah dan masyarakat bisa saling memberikan informasi atau saling bertukar ide pikiran,

sehingga dalam partisipasi tersebut terdapat komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.

2.1.2. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Menurut Schiller dan Antlov yang dikutip oleh Hetifah (dalam Andrian, 2014) partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

2.1.3. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Westra (dalam Rukminto Adi, 2007) manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Lebih memungkinkan untuk memperoleh keputusan yang benar.
2. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
3. Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama.
4. Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
5. Memperbaiki semangat berkejasama serta menimbulkan kesatuan kerja.
6. Lebih meningkatkan untuk mengikuti perubahan-perubahan.

2.1.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk nyata dan tidak nyata. Bentuk partisipasi yang nyata seperti uang, tenaga dan keterampilan, sedangkan dalam bentuk yang tidak nyata berupa pikiran. Menurut Keith Davis dalam Intan dan Mussadun (2013), bentuk partisipasi terdiri dari:

1. Pikiran merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan ide atau pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk tercapainya suatu keinginan.
2. Tenaga merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan menyumbangkan seluruh tenaga yang dimiliki kelompok maupun individu untuk tercapainya suatu keinginan.
3. Keahlian merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal ini keahlian menjadi unsur yang paling penting untuk menentukan suatu keinginan.
4. Barang merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu tercapainya hasil yang diinginkan.
5. Uang merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan cara memberikan uang sebagai alat guna tercapainya keinginan. Biasanya partisipasi ini dilakukan oleh orang-orang dari kalangan atas.

Menurut Holil (dalam Deviyanti, 2013) menguraikan bahwa ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang yang tidak dipaksakan dan diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbangkan harta benda, misalnya seperti alat-alat kerja atau perkakas.

Adapun menurut Chapin (dalam Deviyanti, 2013) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari 4 bentuk, antara lain: (a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. (b) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi yang memberikan ide, pendapat atau buah pikiran yang konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. (c) Partisipasi dalam bentuk proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. (d) Partisipasi representatif adalah partisipasi yang dilakukan

dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Tjokroamidjojo dalam Herdawati (2014:15) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan.
3. Partisipasi di dalam tahap pemanfaatan.

2.1.5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dalam suatu program partisipasi masyarakat, ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat, partisipasi timbul dikarenakan adanya ekspresi dari perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Deviyanti, 2013).

Selain ada faktor pendukung, tentu saja ada faktor penghambat partisipasi masyarakat menurut Watson yang dikutip oleh Soetomo (dalam Deviyanti, 2013) mengatakan bahwa ada beberapa hambatan (kendala) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal dalam partisipasi masyarakat menurut Slamet (dalam Deviyanti, 2013) adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Deviyanti, 2013) faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan sebagai petaruh (Stakeholder), dalam hal ini stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam suatu program ini yaitu pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.2 Pengertian Pariwisata

Secara harfiah kata wisata (tour) dalam kamus berarti perjalanan dimana si pelaku kembali ke tempat awalnya, perjalanan sirkuler yang dilakukan dengan tujuan untuk bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, pada mana berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan yang terencana.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Murphy (dalam Pitana, 2005) pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen.

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, dimana didalamnya memiliki berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Selain itu, menurut Mathiseon and Wall (dalam Pitana, 2005)

mengemukakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, antara lain: (a) dynamic elemen, yaitu perjalanan ke suatu destinasi; (b) static elemen, yaitu singgah di daerah tujuan; (c) consequential elemen, atau bisa disebut sebagai akibat dari dua hal di atas (khususnya pada masyarakat lokal) yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Dalam pariwisata, terdapat sistem yang banyak digerakan oleh banyak aktor yang berperan didalamnya. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan menjadi tiga pilar utama, antara lain: (1) masyarakat; (2) swasta; dan (3) pemerintah. Yang termasuk dalam masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumberdaya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa juga merupakan bagian dari masyarakat. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan dalam kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. (Pitana, 2005).

2.2.1. Pengertian Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata guna mengintegrasikan segala bentuk aspek luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata juga merupakan penggerak utama sektor kepariwisataan. Pengembangan pariwisata tentu saja tidak bisa bergerak sendiri dan harus membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor, seperti pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, serta kerjasama langsung dari kalangan usaha maupun dari pihak swasta. Tugas dan wewenang pemerintah disini adalah sebagai pihak fasilitator yang memiliki peran dan fungsinya dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan pariwisata.

Objek wisata harus memiliki daya tarik sendiri di dalamnya, karena hal itu akan menjadi salah satu modal utama yang harus dimiliki yang bertujuan untuk upaya peningkatan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata. Dengan adanya obyek dan daya tarik wisata merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan wisata, hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki obyek wisata tersebut.

Dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak hanya bisa mengandalkan dari pemerintah saja, tetapi pihak-pihak lain juga ikut turut adil dalam pembangunan infrastruktur pendamping yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Larry E. Helber (dalam Dedy Prasetya, 2014) tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu di mulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah hal itu dilakukan, maka kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem

prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak yang terkait juga diharapkan bisa mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dalam hal ini adalah kesempatan yang baik untuk pemerintah daerah membuktikan kinerja dan kemampuannya dalam melaksanakan wewenangnya yang bisa saja menjadi tolak ukur maju atau tidaknya suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

2.2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata memiliki faktor kunci didalamnya yaitu dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam segala bidang pembangunan, salah satunya adalah pengembangan objek wisata. Akan tetapi, pengembangan objek wisata tidak akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat tidak ikutserta dalam upaya pengembangan wisata tersebut. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki sifat yang tergolong sangat penting menurut Conyers (dalam Supriatna, 2000), antara lain:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan.
3. Timbul persepsi bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat terhadap suatu wilayah. Menurut Hermansyah (2018) nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya adalah peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public, support*).
2. Peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Maksudnya adalah masyarakat sebagai subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan.
3. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Maksudnya peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah.

Partisipasi masyarakat berpengaruh cukup besar terhadap suatu pengembangan. Apabila masyarakat peka dan aktif, maka masyarakat juga akan terlibat dalam proses penentuan arah serta strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam

beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi.

2.3 Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan bagi wisatawan karena didalamnya memiliki sumber daya, baik itu secara alamiah ataupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tarian-tarian, dan kebudayaan khas lainnya.

Objek wisata dipahami sebagai gejala kepergian orang-orang di dalam negaranya sendiri (pariwisata domestik) atau penyebrangan orang-orang pada tapal batas suatu negara (pariwisata internasional). Proses selanjutnya bepergian ini menimbulkan terjadinya interaksi dan hubungan, saling pengertian insani, perasaan, persepsi, motivasi, tekanan, kepuasan, kenikmatan antar sesamapribadi atau antar kelompok.

Fandeli (dalam Widyasmi, 2012) mengemukakan bahwa objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan objek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumberdaya alam dan tata lingkungannya.

Mariotto (dalam Arsyadha, 2002) mengemukakan bahwa yang merupakan objek dan atraksi wisata adalah:

1. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang memiliki istilah pariwisata disebut dengan natural amenities.
2. Hasil cipta manusia (*man made supply*)
3. Tata cara hidup (*the way of life*)

Sedangkan dari sisi penyelenggarannya, Suwanto (2004) mengemukakan bahwa objek wisata dibedakan atas:

1. Ekskursi (*Excursion*), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.
2. *Safari Tour*, yaitu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun peralatan khusus yang tujuan maupun objeknya bukan merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya.
3. *Cruise Tour*, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat tetapi menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.
4. *Youth Tour* (wisata remaja), yaitu kunjungan wisata yang penyelenggarannya khusus di peruntukan bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan oleh hukum negara masing-masing. Di Indonesia umumnya yang dianggap remaja adalah mereka yang masih dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas dan belum duduk di bangku

Perguruan Tinggi, atapun mereka yang usiannya dibawah 21 tahun dan belum kawin.

5. *Marine Tour* (wisata bahari), yaitu suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan, *wreck-diving* (menyelam) dengan perlengkapan selam yang lengkap.

Menurut Sujali (dalam Sari, 2011:46) bahan dasar yang harus dimiliki oleh industri pariwisata dapat dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

1. Objek wisata alam (*natural resources*), yaitu bentuk dari objek wisata ini berupa pemandangan alam seperti pegunungan, pantai, flora dan fauna, atau bentuk yang lain. Contohnya seperti pantai Pulau Datok, pegunungan Lubuk Baji dan lain-lain.
2. Objek wisata budaya atau manusia (*hurrian resources*), yaitu objek wisata yang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan/kehidupan manusia, seperti museum, candi, kesenian, upacara keagamaan, upacara adat, upacara pemakaman atau bentuk yang lain. Contohnya seperti Candi Borobudur dan upacara Rambu Solo.
3. Objek wisata buatan manusia (*man made resources*), yaitu objek yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga bentuknya tergantung pada kreavitas manusianya seperti tempat ibadah, alat musik, museum, kawasan wisata yang dibangun seperti Taman Mini Indonesia Indah dan kebun binatang.

Pengertian objek wisata adalah sumber daya alam, budaya dan buatan yang berpotensi dan berdaya tarik bagi wisatawan. Menurut Suwanto (2004), daya tarik wisata dapat dipengaruhi oleh:

1. Adanya sumber atau objek yang dapat menimbulkan rasa senang, nyaman dan bersih.
2. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjungi.
3. Adanya arti khusus yang bersifat langka.
4. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
5. Objek wisata alam yang mempunyai daya tarik tinggi karena didalamnya terdapat keindahan, seperti keindahan alam pegunungan, pantai, sungai, hutan dan sebagainya.

Adanya Objek dan Daya Tarik wisata menjadi hal yang sangat mempengaruhi dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi wisatawan dalam menentukan lokasi tempat untuk berwisata. Dengan adanya atraksi wisata, aksesibilitas, keindahan alam dan kelebihan lain yang terdapat disuatu lokasi akan menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan aktivitas wisata. Dalam penelitian ini, Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata nya adalah Rajati Flower Garden yang merupakan wisata taman bunga yang memiliki keindahan, dan akses yang mudah serta fasilitas yang tersedia.

2.4 Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai objek wisata yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yeni Susanti (2012) dengan judul Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Objek Wisata Goa Tabuhan Sebagai Daerah Tujuan Wisata (*Tourist Destination Area*) di Desa Wareng Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model perencanaan dan pengembangan pariwisata pada objek wisata Goa Tabuhan sebagai daerah tujuan wisata dan juga untuk mengetahui partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata pada objek wisata. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Goa Tabuhan merupakan salah satu objek wisata yang potensial untuk dikembangkan menjadi Daerah Tujuan Wisata. Masyarakat juga memiliki peran yang strategis sebagai pelaku usaha pariwisata, masyarakat dilibatkan dalam pembangunan dan pengembangan Goa Tabuhan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Selain itu partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan objek wisata sudah baik ataupun belum dapat disebut sebagai partisipasi yang sesungguhnya karena berdasarkan analisis dengan ada beberapa poin yang belum terpenuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih cenderung mengkaji mengenai model perencanaan dan pengembangan pariwisata dan mengetahui partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan objek wisata, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai

pembangunan dan pengembangan objek wisata. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pengembangan wisata dan sama-sama mengkaji dari sudut pandang partisipasi masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh A. Oktami Dewi A.A.P (2013) dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Jurusan Antropologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengembangan objek wisata bahari di Pulau Kapoposang, untuk mengetahui potensi sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam menunjang pengembangan wisata bahari, dan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata bahari. Dari hasil penelitian pola pengembangan pariwisata di Pulau Kapoposang partisipasi masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan objek wisata.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada analisis pengembangan pariwisata dengan penelitian ini fokus pada pola pembangunan dan pengembangan objek wisata. Persamaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dari sudut pandang partisipasi masyarakat.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini akan melihat bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat Rasau Jaya Tiga dalam proses Pengembangan Objek Wisata *Rajati Flower Garden*. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada atau tinggal di sekitar lokasi Objek Wisata *Rajati Flower Garden*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Keith Davis dalam Intan dan Mussadun (2013) yang mana partisipasi masyarakat dapat dilihat dari dua bentuk yaitu partisipasi bentuk nyata seperti tenaga, keterampilan dan uang, sedangkan partisipasi bentuk tidak nyata berupa pikiran.

KERANGKA PIKIR

